

ANALISIS SISTEM DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Refnawati¹, Alia Yovica², Lidya Fransiska Octavia³, Sri Rahmi⁴

^{1, 2, 3, 4}UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Jl. Jenderal Sudirman No.137, Sumatera Barat, Indonesia
Email: refnawati149@gmail.com

Article History

Received: 18-10-2024

Revision: 26-10-2024

Accepted: 28-10-2024

Published: 30-10-2024

Abstract. This article aims to analyze the Islamic education system and policy on the use of BOS funds. This study uses a literature study method with a systematic approach to identify and analyze relevant sources related to the research focus. The data source is taken from scientific journals, books, and academic publications published in the last 10 years, using an online database, namely Google Scholar. The collected data is analyzed qualitatively to identify the main themes and trends in related research. The results of the analysis show that the use of BOS funds is intended for all routine school operating costs, while construction costs do not come from BOS. Abuse in the management of BOS funds is found in several regions, the most frequent cases are the inflating of the number of students, misuse of funds, and even falsification of data and news which often include newspapers about the misappropriation of BOS funds. This can also be triggered by the current system, weak supervision and lack of community participation, thus causing the purpose of the BOS subsidy itself to be less and tend to reduce its usefulness. For this reason, preventive actions are needed from every institution and element of this nation for the progress and effective management of BOS funds.

Keywords: Systems and Policies, Islamic Education, BOS Funds

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sistem dan kebijakan pendidikan Islam tentang penggunaan dana BOS. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis sumber-sumber relevan terkait fokus penelitian. Sumber data diambil dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan publikasi akademis yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir, dengan menggunakan database online yaitu Google Scholar. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif guna mengidentifikasi tema-tema utama dan tren dalam penelitian terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan dana BOS ditujukan untuk seluruh biaya operasional rutin sekolah, sedangkan biaya pembangunan tidak berasal dari BOS. Penyalahgunaan dalam pengelolaan dana BOS banyak dijumpai di beberapa daerah, kasus yang paling sering terjadi adalah pengelembungan jumlah siswa, penyalahgunaan dana, bahkan pemalsuan data dan pemberitaan yang seringkali termasuk surat kabar mengenai penyelewengan dana BOS. Hal ini juga bisa dipicu oleh sistem yang ada saat ini, lemahnya pengawasan dan kurangnya partisipasi masyarakat, sehingga menyebabkan tujuan dari subsidi BOS itu sendiri menjadi kurang dan cenderung mengurangi kegunaannya. Untuk itu diperlukan tindakan preventif dari setiap lembaga dan elemen bangsa ini demi kemajuan dan pengelolaan dana BOS yang efektif.

Kata Kunci: Sistem dan Kebijakan, Pendidikan Islam, Dana BOS

How to Cite: Refnawati., Yovica, A., Octavia, L. F., & Rahmi, S. (2024). Analisis Sistem dan Kebijakan Pendidikan Islam tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5 (5), 6438-6447. <http://doi.org/10.54373/imeij.v5i5.2010>

PENDAHULUAN

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan pengembangan lebih lanjut dari Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan, yang dilaksanakan pemerintah pada kurun 1998-2003, dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM yang dilaksanakan pada kurun 2003-2005. BOS dimaksudkan sebagai subsidi biaya operasional sekolah kepada semua peserta didik wajib belajar, yang untuk tahun 2009 jumlahnya mencapai 26.866.992 siswa sekolah dasar, yang disalurkan melalui satuan pendidikan. Dengan Program BOS, satuan pendidikan diharapkan tidak lagi memungut biaya operasional sekolah kepada peserta didik, terutama mereka yang miskin.

Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Namun, sampai dengan saat ini masih banyak orang miskin yang memiliki keterbatasan akses memperoleh pendidikan berkualitas, hal ini disebabkan antara lain karena mahalnya biaya pendidikan (Hestina & Melinda, 2022). Disisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yang dikenal dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. melibatkan hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang sederajat). Kenaikan harga BBM beberapa tahun belakangan akan menimbulkan kekhawatiran menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin. Hal tersebut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, karena penduduk miskin akan semakin sulit dipenuhi kebutuhan biaya pendidikan (Ta'dung et al., 2022).

Salah satu program di bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan memerdekan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua siswa. BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid (Waluyo et al., 2023). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sistem dan kebijakan pendidikan islam tentang penggunaan dana BOS.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis sumber-sumber relevan terkait fokus penelitian. Sumber data diambil dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan publikasi akademis yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir, dengan menggunakan database online yaitu Google Scholar. Kriteria inklusi dan eksklusi diterapkan untuk memastikan relevansi dan kualitas studi yang diulas. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif guna mengidentifikasi tema-tema utama dan tren dalam penelitian terkait.

HASIL DAN DISKUSI

Pengertian dan Landasan Umum Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berdasarkan PP Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam peraturan tersebut biaya pendidikan dibagi menjadi tiga jenis yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik. PP Nomor 48 Tahun 2008 juga menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dasar sembilan tahun, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Domai, 2010).

Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS merupakan sumber dana yang utamanya digunakan untuk membiayai pengeluaran nonpersonalia pada satuan pendidikan dasar dan menengah dalam pelaksanaan program wajib belajar. Selain itu, dana ini dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan (Sjioen & Ludji, 2020). Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah diawasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaannya, distribusi dan manajemen dana BOS harus mengikuti pedoman yang tertuang dalam Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, yang merupakan kementerian teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan manajemen program BOS (Widyatmoko & Suyatmini, 2017).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan ke berbagai sekolah, baik yang diurus oleh pemerintah maupun swasta, guna mendukung pembiayaan beragam kebutuhan operasional sekolah. Bantuan ini melibatkan pembayaran gaji bagi guru dan karyawan, penyediaan kebutuhan pembelajaran seperti buku dan peralatan tulis, serta pembiayaan untuk keperluan lain seperti listrik, air, dan pemeliharaan bangunan sekolah. Pencairan Dana BOS dilaksanakan

oleh bendahara sekolah setelah mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah, dan dapat dilakukan sesuai kebutuhan dengan tetap menjaga saldo minimum yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku. Manajemen Dana BOS diinginkan agar dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang berarti bahwa pengelolaan dana tersebut diketahui oleh semua pihak yang terlibat di lingkungan sekolah (Rahayuningsih, 2021). Pengelolaan secara akuntabel yaitu di dalam pengelolaan dana BOS, sekolah dapat mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana BOS kepada pemerintah dan masyarakat. Pentingnya transparansi dan akuntabel dalam penggunaan dana BOS merupakan salah satu cara untuk menjalankan program dana BOS dengan lancar dan mendapatkan kepercayaan dari pihak terkait serta masyarakat sekitar karena, masyarakat sebagai perantara penting dalam pelaksanaan pendidikan. Akuntabilitas dalam manajemen pendanaan pendidikan di sekolah berarti, bahwa penggunaan dana sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Fitri, 2014).

Berdasarkan Juknis tahun 2016, penggunaan dana BOS hanya dapat digunakan untuk membiayai 13 komponen belanja/kegiatan yaitu (1) Pengembangan perpustakaan; (2) Kegiatan penerimaan peserta didik baru; (3) Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; (4) Kegiatan ulangan dan ujian; (5) Pembelian bahan habis pakai; (6) Langganan daya dan jasa; (7) Perawatan sekolah/rehab ringan dan sanitasi sekolah; (8) Pembayaran honorarium bulanan; (9) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; (10) Membantu peserta didik miskin; (11) Pembiayaan pengelolaan sekolah; (12) Pembelian dan perawatan perangkat komputer; dan (13) Biaya lainnya, jika seluruh komponen 1 sampai dengan 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS. Sedangkan untuk Juknis tahun 2017, penggunaan dana BOS hanya dapat digunakan untuk membiayai 11 komponen belanja/kegiatan (Pontoh et al., 2020).

Pengelolaan dana BOS yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan dana BOS, yang didalamnya mengatur (1) mekanisme penganggaran dana BOS, (2) pelaksanaan dan penatausahaan dana BOS, serta (3) pertanggungjawaban dana BOS. Sasaran penerima dana BOS berdasarkan petunjuk teknis (juknis) tahun 2016 adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/Satap/SLB, baik negeri maupun swasta yang sudah terdata dalam sistem data pokok pendidikan dasar dan menengah (Dapodikdasmen). Khusus bagi sekolah swasta, harus memiliki izin operasional (Tinggogoy, 2023). Keuangan sekolah dipantau dengan baik, namun penegakan hukumnya tidak seragam di semua sekolah. Faktor-faktor seperti kondisi fisik sekolah, letak geografis, dan persepsi masyarakat terhadap sekolah akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam mengelola keuangan sekolah. Semakin erat aktivitas yang dibutuhkan masyarakat, sekolah

dengan kebutuhan publik yang lebih tinggi dalam mengelola keuangan juga sangat digemari warga (Adriana Hanny Bella Sukma & Alifia Maharani Nasution, 2022).

Suatu kesulitan untuk mengelola dana khususnya di sekolah yaitu tidak mencatat setiap transaksi dengan baik. Akibatnya setiap kesepakatan tidak ditulis dengan betul apalagi tidak ditulis sedikit pun maka akan menyebabkan laporan keuangan tidak setara dengan kenyataan (Nurrochman et al., 2023). Pemerataan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik menjadi asas yang perlu dipatuhi dengan mengelola keuangan sekolah. Pengelolaan di sekolah dasar bukan sekedar menyelenggarakan kelas, alat fisik serta aktivitas sehari-hari, namun juga menjadikan lingkungan sekolah dan kelas sebagai tempat yang nyaman untuk membantu siswa belajar (Aliyyah & Abdurakhman, 2016).

Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan dana BOS

Penyalahgunaan dan Penyelewengan Dana

- **Korupsi dan Pungutan Liar:** Praktik perlindungan dana BOS, termasuk penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa, serta pungutan pembohong, menjadi masalah serius. Banyak kepala sekolah yang diminta untuk menyetor sejumlah uang ke pihak tertentu dengan dalih mempercepat pencairan dana atau sebagai uang administrasi.
- **Pelaporan Palsu:** Terdapat kasus di mana laporan penggunaan dana BOS dimanipulasi untuk menutupi penyelewengan, seperti pemalsuan tanda tangan guru untuk laporan honor (Nugraha et al., 2023).

Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas

- **Tidak Memublikasikan Penggunaan Dana:** Sekolah sering kali tidak memublikasikan penggunaan dana BOS di papan informasi, yang seharusnya menjadi kewajiban sesuai petunjuk teknis. Hal ini menciptakan celah bagi praktik penyimpangan.
- **Pengawasan yang Lemah:** Pengawasan terhadap penggunaan dana BOS dari pihak dinas pendidikan seringkali tidak ketat. Kurangnya tenaga administrasi yang khusus mengelola dana ini juga berkontribusi pada lemahnya akuntabilitas.
- **Terlambatnya Penyusunan RAPBS:** Sekolah sering mengalami kesulitan dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tepat waktu, yang mengakibatkan keterlambatan dalam pencairan dana BOS
- **Kurangnya Pemahaman tentang Pengelolaan Dana:** Banyaknya tenaga pengelola di sekolah tidak memahami sepenuhnya fungsi dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan dan tanggung jawab penggunaan dana.

- Sekolah tidak diberikan kemerdekaan/wewenang penuh dalam penggunaan dana BOS, sehingga tidak bisa membelanjakannya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya buku, harus ada, dibeli setiap tahun, ditentukan juga oleh dinas pendidikan penerbitnya. Anggaran diberikan, namun pos-posnya sudah dibatasi dalam aturan. Misalnya ada kerusakan, hanya sekian persen yang bisa digunakan untuk perbaikan (Muryati, 2016).

Banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi akibat penyalagunaan dana BOS, seperti kasus yang terjadi terhadap Kepala SMAN 1 Awayan tersangka korupsi dana BOS. Hal ini berdasarkan ungkapan Kasi Pidsus Kejari Balangan Herry, bahwa penyelidikan terhadap kepala sekolah SMAN 1 Awayan dimulai sejak 8 Juni 2017 lalu, total indikasi kerugian negara dari hasil audit yaitu: Rp 408.426.435(kalimantanpost.com, 2017). Hal serupa juga terjadi terhadap tiga guru di SMP Negeri 9 Ambon yang melakukan penyelewengan terhadap dana BOS yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 1.282.612.477. Berdasarkan kasus-kasus tersebut lembaga pendidikan lainnya harus menjadi perhatian yang serius, agar dalam mengelola dana BOS haruslah sesuai dengan aturan, transparan, serta melibatkan tim termasuk komite tidak hanya dikelola oleh kepala sekolah sendiri, bendahara ataupun oknum-oknum tertentu saja.

Solusi Untuk Meningkatkan Pengelolaan Dana BOS

Solusi untuk mengatasi permasalahan tentang pengelolaan dana BOS tersebut, yaitu (Fitri, 2017):

- Peningkatan pelatihan dan kapasitas SDM: Penting untuk memberikan pelatihan kepada kepala sekolah, bendahara, dan staf lainnya mengenai pengelolaan keuangan, akuntabilitas, dan transparansi. Pemahaman yang baik tentang fungsi dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS akan mengurangi risiko kesalahan administratif dan administratif.
- Partisipasi stakeholder: melibatkan semua pemangku kepentingan pendidikan, termasuk guru, komite sekolah, dan orang tua murid dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana BOS. Musyawarah untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus melibatkan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa kebutuhan sekolah terakomodasi dengan baik.
- Pengawasan yang lebih ketat: Pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan dana BOS perlu diperkuat. Inspektorat dan dinas pendidikan harus melakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Pengawasan yang ketat dapat mencegah perlindungan dana dan meningkatkan akuntabilitas.

- **Transparansi Melalui Digitalisasi:** Mengimplementasikan sistem digital untuk melacak penggunaan dana, sehingga memudahkan publikasi laporan keuangan. Pengelolaan dana BOS harus dilakukan dengan transparansi yang tinggi. Sekolah wajib mempublikasikan rencana penggunaan dana, laporan keuangan, dan realisasi anggaran di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan informasi sekolah atau website resmi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mencegah terjadinya ekosistem dana.
- **Evaluasi berkala:** melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan dana BOS untuk menilai efektivitas penggunaan dana serta mencari solusi atas masalah yang muncul selama proses pengelolaan. Evaluasi ini juga dapat melibatkan masukan dari orang tua murid dan masyarakat (Intan, 2022).

Dengan mengatasi permasalahan ini, pengelolaan dana BOS yang diharapkan dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga tujuan utama program ini meningkatkan mutu pendidikan dapat tercapai secara efektif.

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOS. Dalam rangka implementasi penerapan MBS di sekolah, dana BOS diharapkan dapat dikelola secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan dana BOS secara transparan artinya dalam pengelolaan dana BOS diketahui oleh stakeholder sekolah. Pengelolaan dana BOS secara akuntabel artinya dalam pengelolaan dana BOS, sekolah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS kepada pemerintah maupun masyarakat (Kemendikbud, 2016).

Dana BOS Sekolah harus dikelola dengan cara yang baik melalui langkah-langkah yang tepat agar tercapainya kesepakatan bersama terkait penggunaan dana BOS. Sehingga sekolah dapat mendukung keberlanjutan peningkatan kualitas pendidikan (Pebriyanti & Aliyyah, 2024). Diantara langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu:

- Dana yang telah dicairkan harus terus digunakan. Sekolah perlu pembelian semua keperluan belajar, yaitu pembangunan sekolah, membangun kepastakaan, dan meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
- Melakukan monitoring, hal tersebut dilakukan dapat memastikan akuntabilitas, kejelasan, serta efisiensi dalam mengelola dana sehingga sekolah dapat berjalan efektif dan tercapainya tujuan serta sasaran yang diharapkan.

- Sekolah harus mencari tenaga administrasi dalam mengelola dana BOS termasuk kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, serta petugas pelayanan khusus sekolah. Sekolah bisa memberikan pertanggungjawaban dalam menyusun anggaran, mencatat pengeluaran, serta melaporkan dana sesuai dengan peraturan.
- Rapat diskusi pertemuan kepala sekolah, pendidik, serta tenaga kependidikan untuk berkumpul membahas strategi terkait pengelolaan dana BOS. Diskusi tersebut membahas penentuan alokasi dana, evaluasi kebutuhan sekolah, serta rencana penggunaan dana (Silele et al., 2017).

Berdasarkan uraian di atas maka analisis pemakalah yaitu, bahwa: salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah pengelolaan dana dan segala sumberdaya yang ada dalam program BOS. Pentingnya pengelolaan dana BOS yaitu, dengan pengelolaan yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan efisien. Pengelolaan dana BOS yang baik merupakan suatu keberhasilan sekolah dalam mengelola dana BOS, melalui suatu proses kerjasama yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi (Wahyuni & Nurwana, 2023). Dalam merencanakan penggunaan dana BOS kepala sekolah terlebih dahulu menyesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek, maupun jangka panjang. Dalam perencanaan penggunaan dana BOS, hal utama dilakukan adalah menyusun RAPBS. RAPBS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program kerja tahunan yang terdiri dari sejumlah kegiatan rutin serta beberapa kegiatan lainnya disertai rincian rencana pembiayaannya dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian, RAPBS berisi ragam sumber pendapatan dan jumlah nominalnya, baik rutin maupun pembangunan, ragam pembelanjaan, dan jumlah nominalnya dalam satu tahun anggaran. Penyusunan RAPBS perlu memerhatikan asas anggaran antara lain asas kecermatan, asas terinci, asas keseluruhan, asas keterbukaan, asas periodik, dan asas pembebanan.

KESIMPULAN

Mekanisme pencairan BOS awalnya berasal dari pusat, namun sejak pertengahan tahun 2010 dana BOS dialihkan ke pemerintah daerah yang akan menjadi sumber APBD. Jadi saat ini sekolah tidak menerima dananya langsung dari rekening pusat, melainkan bersumber dari APBD. Penggunaan dana BOS ditujukan untuk seluruh biaya operasional rutin sekolah, sedangkan biaya pembangunan tidak berasal dari BOS.

Penyalahgunaan dalam pengelolaan dana BOS banyak dijumpai di beberapa daerah, kasus yang paling sering terjadi adalah pengelembungan jumlah siswa, penyalahgunaan dana, bahkan pemalsuan data dan pemberitaan yang seringkali termasuk surat kabar mengenai penyelewengan dana BOS. Hal ini juga bisa dipicu oleh sistem yang ada saat ini, lemahnya pengawasan dan kurangnya partisipasi masyarakat, sehingga menyebabkan tujuan dari subsidi BOS itu sendiri menjadi kurang dan cenderung mengurangi kegunaannya. Untuk itu diperlukan tindakan preventif dari setiap lembaga dan elemen bangsa ini demi kemajuan dan pengelolaan dana BOS yang efektif, diantaranya solusi yang kami tawarkan adalah kembali mengkaji kebijakan yang sudah ditetapkan, karena satu kebijakan tidak mungkin langsung cocok pada pelaksanaan tataran

REFERENSI

- Domai, T. (2010). *Manajemen Keuangan Publik*. UB Press.
- Fitri, A. (2014). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 2(1).
- Fitri, A. (2017). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 2(1).
- Hestina, N. A., & Melinda, D. (2022). Kebijakan Kontroversial Mengenai Dana BOS 2021. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 7(1), 25–29. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v7i1.994>
- Intan, T. P. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Kejuruan Sukabumi. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 1(2).
- kalimantanpost.com. (2017). *Kepala Sekolah SMAN 1 Awasan Tersangka Korupsi Dana Bos*.
- Kemendikbud. (2016). *Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama*. Kemendikbud.
- Muryati, I. (2016). Pengelolaan Dana BOS Pada SD Negeri Di Upt Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(2), 237. <https://doi.org/10.21831/amp.v4i2.10802>
- Nugraha, A., Hairani, N. K., & Prisila, R. (2023). Strategi Pengelola Dana Bos Dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas. *PEMA (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(2), 75–80. <https://doi.org/10.56832/pema.v3i2.355>
- Pebriyanti, D., & Aliyyah, R. R. (2024). Manajemen Keuangan: Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 3(3).
- Pontoh, J., Ilat, V., & Manossoh, H. (2020). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Kotamobagu. *Jurnal Pendidikan*, 2(2).
- Rahayuningsih, S. (2021). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 1(2), 110. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i2.10128>

- Silele, E., Sabijono, G., & Pusung, R. J. (2017). *Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada SD Inpres 4 Desa Akediri Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat)*.
- Sjioen, & Ludji. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Negeri Bonipoi 2 Kota Kupang. *Jurnal Inspirasi Ekonomi*, 2(3).
- Tinggogoy, D. C. (2023). Analisis Dampak Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) (Studi di SMA Negeri 1 Halmahera Utara). *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 2(3).
- Wahyuni, L., & Nurwana, A. (2023). *Pengaruh Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (ARKAS) Dan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bos Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dana Bos di Kota Makassar*. 05(04).
- Waluyo, T., . H., & . S. (2023). Transparansi Penggunaan Dana Bos di Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 28–37. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i1.316>
- Widyatmoko, & Suyatmini. (2017). Pengelolaan dan Bantuan Operasional Sekolah di SD N Kemasari 1 Surakarta. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 12(2).
- Yohanis Lotong Ta'dung, Isak Pasulu, Dwibin Kannapadang, & Jens Batara Marewa. (2022). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) Pada SMA Katolik Rantepao, Toraja Utara. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 2(2), 167–175. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v2i2.327>